

# Implementasi Program Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Rosyidatul Aini<sup>1</sup>, Adi Soesiantoro<sup>2</sup>, Yusuf Hariyoko<sup>3</sup>

[rosyiaini07@gmail.com](mailto:rosyiaini07@gmail.com)

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **Abstrac**

*Tourism as the Core Economy of Indonesia because the one of the largest foreign exchange earners in 2019 so that it can improve the economy of the community. Therefore this research discusses the implementation of a tourist village program in order to improve the economy of the community in Hendrosari Village, Menganti District, Gresik Regency. The purpose of the research is to know the implementation of a tourist village program in the village. The method used is descriptive qualitative method with observation, interview and documentation approach. The result of the research is that the implementation of the tourist village program has been carried out and being subjected of the economic situation has increased but there are only obstacles which are the lack of several supporting facilities that have not been fulfilled.*

**Keywords : Implementation, Tourist Village, Economy**

## **Abstrak**

*Pariwisata dinobatkan sebagai Care Economy Indonesia karena merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar pada tahun 2019 sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai implementasi program desa wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program desa wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan program desa wisata sudah terlaksana dengan baik dan keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran sudah mengalami peningkatan hanya saja terdapat penghambat yaitu kurangnya beberapa fasilitas pendukung yang belum terpenuhi.*

**Kata Kunci: Implementasi, Desa Wisata, Ekonomi**

## **Pendahuluan**

Pariwisata dinobatkan sebagai *Care Economy* Indonesia karena merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar pada tahun 2019, yakni sebesar US\$ 20 Miliar. Hal ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Penulis Pertama

<sup>2</sup> Penulis Kedua

<sup>3</sup> Penulis Ketiga

sekitar yang tinggal di dekat kawasan wisata dan membuktikan bahwa pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu terdapat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Selain itu, pariwisata memberikan tujuan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan adanya *multiplier effect* yang ditimbulkan. Pengelolaan pariwisata yang baik akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menghapus kemiskinan. Dengan adanya pariwisata jelas akan membutuhkan pekerja, seperti pemandu wisata, pengelola, dan masih banyak lagi pekerja yang dibutuhkan sehingga akan mengurangi banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, serta dapat melibatkan UMKM lokal dengan produk-produk khas dari desa tersebut.

Program Desa Wisata di Hendrosari bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) melalui Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) 2019. Program ini merupakan upaya Kementerian Desa PDTT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas, melalui strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

Sebelum adanya desa wisata ini, citra Desa Hendrosari masih terkenal dengan desa memabukkan atau desa penghasil minuman keras. Hal ini dikarenakan banyaknya produsen *tuak* yang berada disana. Masyarakat belum mengetahui inovasi pengolahan potensi yang ada di desanya dengan benar. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yaitu banyaknya pohon siwalan yang ada disana tetapi masyarakat masih belum bisa mengembangkannya. Setelah adanya desa wisata, juga terdapat permasalahan, yaitu kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan hanya masyarakat yang bekerja di bidang ini saja yang merasakan, serta terdapat beberapa fasilitas pendukung yang belum lengkap. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program desa wisata yang ada di Desa Hendrosari, Kecamatan menganti, Kabupaten Gresik.

Jika kita membahas implementasi, maka kita terlebih dahulu membahas mengenai kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1978) dalam kutipan Prof.

Dr. Muh. Irfan Islamy, MPA. (2014, hal. 3) menjelaskan “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Dye, kebijakan publik tidak hanya fokus kepada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tetapi juga apa yang tidak dilakukannya, hal ini dikarenakan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan mempunyai akibat yang sama untuk masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan praktek dari kebijakan publik yang telah disetujui atau bersifat praktis dan juga salah satu proses yang penting, berbeda dengan formulasi kebijakan yang bersifat teoritis karena hanya berupa perumusan kebijakan publik saja. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2005, hal. 102) mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Terdapat 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam Agustino (2008, hal. 141-144), yaitu:

#### 1) Ukuran dan tujuan

Merupakan hal yang penting untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan, hal ini dilakukan agar kebijakan publik yang sudah direncanakan dapat sesuai dengan keinginan. Sasaran dan kejelasan program harus dapat dilihat secara spesifik agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang sudah direncanakan.

#### 2) Sumber Daya

Terdapat bermacam-macam sumber yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu sumber daya manusia, sumber daya biaya dan sumber daya waktu. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana program kebijakan publik. Sedangkan sumber daya biaya atau modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan kebijakan, karena

tanpa adanya biaya akan menghambat proses implementasi kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu faktor keberhasilan kebijakan juga dapat dilihat dari sifat atau ciri-ciri instansi/badan pelaksana kebijakan. Hal tersebut sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

### 4) Sikap / Kecenderungan para Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan dan bukan warga atau masyarakat.

### 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun komunikasi antar aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.

### 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena jika lingkungan eksternal tersebut kondusif maka akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Program Desa wisata merupakan salah satu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal. Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Sedangkan menurut Wiendu (1993) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas

Adanya pariwisata akan memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari berbagai aspek lainnya. Berikut adalah manfaat dari adanya desa wisata:

1. Ekonomi

Adanya desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, hal ini dikarenakan masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaannya.

2. Sosial

Dengan adanya desa wisata dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu juga dapat meningkatkan jiwa usaha kepada masyarakat desa yang rata-rata profesinya sebagai petani.

3. Budaya

Desa wisata memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan. Dengan adanya banyak wisatawan yang datang, dan apabila warga setempat menunjukkan kebudayaan yang ada didesanya, maka akan sekaligus memperkenalkan budaya yang ada ke masyarakat luar yang awam terhadap kebudayaannya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berlokasi di Desa Hendrosari, Kecamatan Mnganti, Kabupaten Gresik dan berfokus pada Implementasi program desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mempunyai dua jenis data,

yaitu data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

## **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dibahas menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 indikator yang akan dibahas didalam penelitian ini menurut teori tersebut, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program desa wisata di Desa Hendrosari yaitu untuk mensejahterahkan masyarakatnya, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomiannya. Hal ini terbukti dengan naiknya Pendapatan Asli Desa Hendrosari sejak adanya program desa wisata. Awalnya Pendapatan Asli Desa hanya Rp. 15 – 20 juta saja setiap tahunnya. Tetapi setelah adanya program desa wisata, Pendapatan Asli Desa mengalami peningkatan yang drastis menjadi Rp. 60 – 160 juta. Masyarakat Desa Hendrosari juga merasakan adanya perubahan pada perekonomiannya. Sehingga tujuan dari implementasi program desa wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sudah sesuai keinginan.

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn bahwa sasaran dan kejelasan program harus dapat dilihat secara spesifik agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program yang sudah direncanakan. Sasaran program Desa wisata di Desa hendrosari yaitu masyarakat yang tergolong tidak mampu, masyarakat yang tidak bekerja dan untukpara remaja. Sesuai data di lapangan, sasaran tersebut sudah tepat dan terlaksana dengan baik. Dapat dibuktikan dengan adanya UKM dan pegawai yang berada disana. Terdapat 103 PKL dan 32 karyawan yang merupakan masyarakat setempat.

Ukuran kebijakan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu program menurut Van Meter dan Van Horn. Tolok ukur keberhasilannya menurut pemerintah daerah dan pemerintah desa yaitu adanya peningkatan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa menurut BUMDes. Hal tersebut sudah tercapai dan membuktikan bahwa program desa wisata di Desa Hendrosari sudah sesuai dengan tujuan dan ukuran keberhasilan menurut Van Meter dan Van Horn.

## 2. Sumber Daya

Terdapat beberapa sumber daya yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana kebijakan. Hal ini yang dimaksud penggerak atau pelaksananya yaitu masyarakat Desa Hendrosari. Dari mulai perencanaan program sampai pelaksanaan, masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah desa maupun BUMDes. Terbukti dengan respon yang baik dari masyarakat saat awal direncanakannya program desa wisata ini. Bahkan masyarakat lah yang bergotong royong untuk membangun tempat wisata dan ikut andil dalam musyawarah desa. Masyarakat juga diberikan pelatihan agar mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang ada, baik pelatihan membuat produk maupun mengenai pengembangan wisata. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya program desa wisata. Berdasarkan data di lapangan, kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Hendrosari sudah baik dan dapat melaksanakan program desa wisata dengan baik juga. Terbukti dengan adanya wahana wisata yang terus berkembang dan olahan produk siwalan yang terus berkembang.

### b. Sumber Daya Biaya

Sumber daya biaya merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program desa wisata. Modal awal berdirinya program desa wisata di Desa Hendrosari yaitu berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) melalui Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) 2019 sebesar Rp. 1,3 Milyar yang seluruhnya digunakan untuk membangun fasilitas pariwisata. Ditambah dengan Dana Desa sebesar Rp. 300 juta dan Kas BUMDes sebesar Rp. 50 juta. Biaya pengelolaan berasal dari tiket masuk wisata. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Hendrosari selalu memberikan transparansi anggaran atau keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan wisata. Keterbukaan

dilakukan dengan memasang banner tentang pengelolaan keuangan dan bertujuan agar masyarakat setempat mengetahui pengelolaannya. Masyarakat juga sudah merasakan hasil dari adanya program desa wisata, tetapi tidak semuanya. Hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran untuk wisata ini merupakan orang yang belum mempunyai pekerjaan, orang yang tidak mampu dan remaja Desa Hendrosari. Sistem bagi hasil hanya dirasakan untuk warga yang bekerja di bidang pariwisata, dan sisanya digunakan untuk pengelolaan. Akibatnya tidak semua merasakan hasil dari desa wisata secara merata sehingga menyebabkan sumber daya biaya masih kurang baik pengelolaannya untuk Desa Wisata Hendrosari.

#### c. Sumber Daya Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu faktor dapat terlaksananya desa wisata. Tanpa adanya pemasaran, maka program desa wisata di Desa Hendrosari juga tidak akan terlaksana dengan baik. Pemasaran sudah dilakukan oleh pemerintah, BUMDes maupun masyarakat setempat. Baik melalui mulut ke mulut dan juga sosial media. Dengan adanya pemasaran wisata ini, Desa wisata di Hendrosari semakin terkenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata, bahkan pada saat akhir pekan bisa mencapai 3000-4000 pengunjung. Ini membuktikan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah, BUMDes dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh DISPARBUD Kabupaten Gresik mengenai promosi yang dilakukan desa wisata dalam mendatangkan wisatawan.

#### d. Sumber Daya Peralatan

Peralatan bisa dikaitkan dengan fasilitas yang ada di kawasan wisata. Berdasarkan penelitian di lapangan, fasilitas yang ada sudah baik dan layak tetapi beberapa belum memenuhi persyaratan fasilitas pendukung yang sudah ditetapkan oleh

DISPARBUD Kabupaten Gresik. Toko Cinderamata sudah ada, tetapi hanya sedikit dan belum menampung semua pedagang yang ada. Sehingga banyak UKM yang mendirikan kios seadanya didepan kawasan wisata. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk membangun kios-kios UKM yang semakin banyak. Rencananya akan dibangun tempat khusus untuk UKM yang ada dan disediakan tempat parkir untuk pengunjung UKM. Kemudian penginapan/*Homestay* juga belum tersedia. Pusat Informasi Pariwisata yang juga sangat dibutuhkan oleh wisatawan juga belum ada di kawasan wisata Desa Hendrosari. Tetapi, untuk fasilitas pendukung yang lain seperti rumah makan, toilet, musholla, area parkir, balai pertemuan, tempat sampah, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan sarana pendukung seperti taman, wahana, dan lain-lain sudah memenuhi standar sebagai tempat wisata. Masyarakat juga merasa penyediaan fasilitas di kawasan wisata sudah baik. Jadi, sumber daya peralatan atau penyediaan fasilitas di Desa Wisata Hendrosati sudah baik tetapi masih kurang lengkap.

#### e. Sumber Daya Metode

Metode atau upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat pada pelaksanaan program desa wisata. berdasarkan penelitian di lapangan, sudah banyak masyarakat yang terlibat. Dari sebelumnya dia belum mempunyai pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan yang layak. Banyak masyarakat yang membuka usaha dan menjadi pegawai di kawasan wisata. Upaya pemerintah sudah berhasil dan masyarakat juga berupaya untuk menjaga eksistensi kawasan wisata dengan ikut menjaga dan merawat lingkungan sekitar.

Jadi, Sumber daya untuk pelaksanaan Desa Wisata sudah cukup baik. Sumber daya manusianya juga sudah sering mengikuti sosialisasi dan pelatihan, serta masyarakat dilibatkan dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Sumber daya pemasaran juga sudah baik dan sesuai dengan apa yang tertera di persyaratan desa wisata menurut DISPARBUD Kabupaten Gresik yaitu melalui

internet. Sumber daya peralatan juga sudah cukup baik namun terdapat beberapa fasilitas yang belum ada dan terpenuhi sesuai persyaratan dari DISPARBUD Kabupaten Gresik. Kemudian sumber daya metode juga sudah sesuai dengan RIPKD Kabupaten Gresik 2013-2025 pasal 47 mengenai upaya pemerintah mendirikan desa wisata adalah untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat:

### 3. Karakteristik agen pelaksana

Masing-masing badan pelaksana program mempunyai peran masing-masing dan akan berpengaruh pada pelaksanaan programnya. Peran DISPARBUD Kabupaten Gresik sudah cocok dan sesuai. DISPARBUD Kabupaten Gresik selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa wisata di Desa Hendrosari secara berkala. Begitupun Pemerintah Desa Hendrosari selalu memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program desa wisata yang dikelola oleh BUMDes Hendrosari. Sedangkan BUMDes mengelola kawasan wisata baik manajemennya, operasional, laporan biaya dan lain sebagainya. Sesuai penelitian di lapangan, masing-masing badan tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik, terbukti masyarakat juga mengetahui peran masing-masing badan tersebut. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, peran dan kinerja para badan pelaksana tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi program desa wisata di Desa Hendrosari.

### 4. Sikap/Kecenderungan Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana lah yang merumuskan kebijakan dan bukan warga atau masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan tersendiri dalam melakukan tugasnya masing-masing. Pemerintah daerah cenderung melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat desa wisata. pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan agar masyarakat lebih produktif. Sedangkan pemerintah desa cenderung kepada BUMDes untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaannya. Selain itu, pemerintah desa juga mengurus masalah laporan keuangan desa wisata. Pemerintah juga cenderung terbuka dan mau menerima

kritik dan saran dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pelaksana cenderung melaksanakan program ini dengan baik.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi pelaksana berjalan sangat baik. DISPARBUD Kabupaten Gresik selalu menjalin komunikasi kepada Pemerintah Desa Hendrosari, begitupun juga pemerintah Desa Hendrosari kepada DISPARBUD Kabupaten Gresik. Semua yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan wisata selalu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Selain dengan DISPARBUD Kabupaten Gresik, Pemerintah Desa Hendrosari juga selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BUMDes mengenai pelaksanaan program desa wisata dan BUMDes juga melakukan hal yang sama. Masyarakat juga selalu diberikan kesempatan terlibat dalam pengembangan kawasan wisata, dan diberikan kesempatan untuk dapat memberikan kritik dan saran kapan pun. Aktivitas pelaksanaan terdapat hambatan, yaitu pada awal pelaksanaan masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dan juga terdapat anak-anak muda yang tidak setuju. Tetapi pemerintah dapat menyelesaikan itu dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun komunikasi antar aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sangat mendukung terhadap pelaksanaan program desa wisata. Terbukti dengan program desa wisata ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada tantangan yang berarti. Selain itu, DISPARBUD Kabupaten Gresik dan DPMD kabupaten Gresik sangat mendukung pelaksanaan program tersebut. Seperti pada saat masa pandemi covid-19, DISPARBUD Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Desa Hendrosari melakukan pembukaan wisata dalam era *new normal* dengan mewujudkan wisata yang memenuhi protokol kesehatan, seperti terdapat area cuci tangan, penyemprotan disinfektan, cek suhu dan arahan *social distancing*. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang adaptif dan peka terhadap

keadaan. Selain itu perekonomian masyarakat yang menjadi sasaran program desa wisata yang dikelola BUMDes mengalami perubahan menjadi lebih baik dan sejahtera, yaitu masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, dan remaja Desa Hendrosari agar lebih produktif. Tetapi dampak peningkatan ekonomi di lingkungan masyarakat belum merata, sehingga hanya beberapa saja yang merasakan dampaknya. Kondisi perekonomian jika dibandingkan dengan sebelum adanya desa wisata saat ini sudah lebih baik dan masyarakat juga lebih produktif. Banyak masyarakat yang membuka usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti mengolah produk dari siwalan yang sebelumnya hanya diolah menjadi legen dan tuak, sekarang sudah banyak inovasi baru. Kemudian terdapat waduk yang dulunya hanya digunakan untuk tempat memancing, sekarang digunakan untuk wahana permainan air yang lebih menguntungkan. Inovasi-inovasi tersebut menjadikan perekonomian masyarakat meningkat dan Pendapatan Asli Desa juga meningkat.

## **Kesimpulan**

Jadi, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa implementasi Program Desa Wisata dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sudah cukup baik. Penyimpulan tersebut mendasar dari faktor keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan pelaksana, komunikasi, dan lingkungan social, ekonomi, politik belum terpenuhi secara keseluruhan. Dari keenam indikator tersebut indikator pendukung dan penghambatnya yaitu

### a. Indikator pendukung

#### 1. Ukuran dan Tujuan

Tolok ukur keberhasilannya menurut pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait program desa wisata di Desa Hendrosari yaitu adanya peningkatan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa

#### 2. Karakteristik Agen Pelaksana

Keseluruhan stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata Hendrosari sudah mengetahui dan menjalankan perannya masing – masing.

Termasuk masyarakat desa yang mempunyai partisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata Hendrosari

### 3. Kecenderungan Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana dalam program desa wisata Hendrosari mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sikap atau kecenderungan pelaksana terlihat dari konsistensi pelaksanaan wewenang. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan pemerintah desa menjalankan fungsi mentoring.

### 4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Proses penyampaian program desa wisata Hendrosari sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan berbagai stakeholders yang terlibat mematuhi perannya dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya

### 5. Lingkungan Social, Ekonomi Dan Politik

Dukungan kondisi lingkungan social, ekonomi dan politik terlihat dari dukungan masyarakat terhadap pengembangan desa wisata Hendrosari, iklim usaha yang mendukung terbukanya pasar wisata bagi desa wisata Hendrosari dan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam program pengembangan desa wisata Hendrosari

#### b. Indikator penghambat

Sumber daya tidak terpenuhi secara keseluruhan, utamanya sumber daya peralatan dimana dukungan fasilitas pendukung dan pelengkap yang harusnya menjadi syarat mutlak adanya desa wisata seperti penginapan dan pusat informasi tidak tersedia disana.

Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu diperlukan konsistensi sikap dan kebijakan dari pelaksana kebijakan guna mendukung eksistensi dari desa wisata Hendrosari untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar wisata, dan diperlukan inovasi pelayanan pengunjung dan juga pemenuhan fasilitas pendukung dan penunjang wisata. Seperti pembangunan kios untuk UKM agar lebih layak, serta adanya homestay atau tempat penginapan untuk wisatawan yang berkunjung.

## Daftar Pustaka

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (pp. 141-144). Bandung: Alfabeta.

- Ayuningtyas, N. (2016, Desember 1). *Dictio*. Retrieved Maret 2020, 22, from dictio.id: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-problem-solving/3239>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dr. Taufiqurokhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan* (p. 3). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers) .
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik*. Retrieved juni 23, 2020, from disparbud gresik: <https://disparbud.gresikkab.go.id/>
- Pemerintah Desa Hendrosari*. Retrieved Juni 23, 2020, from hendrosaridesaid: <https://hendrosaridesaid.wordpress.com/>
- Ibeng, P. (2020, Januari 12). *Pendidikan*. Retrieved Maret 22 , 2020, from Pendidikan.co.id: <https://pendidikan.co.id/kebijakan-pengertian-tingkatan-macam-menurut-para-ahli/>
- Ilham, M. (2019, November 30). *Pengertian Data – Contoh, Jenis-Jenis, Metode Dan Fungsi data*. Retrieved Maret 27, 2020, from materi belajar: <https://materibelajar.co.id/pengertian-data/>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal* (p. 1). Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementrian Keuangan. (2018, Oktober 09). *Strategi Pengembangan Kepariwisata Indonesia*. Retrieved Maret 10, 2020, from djppr kemenkeu: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/>
- Nailufar, N. N. (2020, Januari 9). *kompas.com*. Retrieved Maret 29, 2020, from Desa: Definisi dan unsurnya: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>
- Priasukmana, S. &. (2001). Pembangunan Desa Wisata Kepulauan Karimun Jawa. *Journal of Educational Social Studies, Vol. 2 No.1* , 42-46.
- Prof. dr. Muh. Irfan Islamy, M. (2014). Modul 1 - Universitas Terbuka Respository. *Definis dan Makna Kebijakan Publik* , p. 3.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tachan. (2008). *Implementasi Budaya Unggulan Di Industri Menuju World Class* (p. 29). Jakarta: Menara Tunggal.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan* (pp. 40-50). Malang: UMM.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi* (pp. 32-34). Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (p. 102). Yogyakarta: Media Pressindo.